



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN



Sertifikat

diberikan kepada :

Ir. Muktasam, M. Agr. Sc, Ph. D

atas partisipasinya sebagai

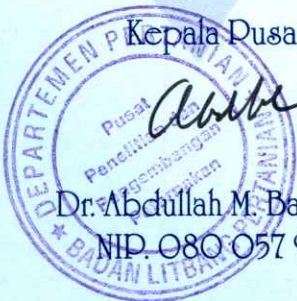
PEMAKALAH

dalam acara

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner

Bogor, 11 - 12 Nopember 2008

Kepala Pusat,



Dr. Abdullah M. Bamualim
NIP. 080 057 910

Ketua Panitia,



PANITIA SEMINAR NASIONAL
TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN VETERINER
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Dr. Bram Brahmantiyo
NIP. 131 898 644

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT – NTB: MENGAPA GAGAL?

(Critical Analysis on Livestock Agribusiness Development Programme in
West Lombok Regency, West Nusa Tenggara)

MUKTASAM¹, I-W. SUADNYA¹, E. MARTINDAH² dan R.A. SAPTATI²

¹Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, Lombok

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Jl. Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

ABSTRACT

Various programs have been implemented to empower cattle farmers, however fact indicates that many of those programs could not empower the farmers, and even fail. In West Nusa Tenggara (NTB), especially in Lombok Island, there are programs such as District Government Aid Program, Integrated Regional Development Program (PPWT), Food Resilience Program (PKP), Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project (NTAADP), Agribusiness Development Program (PPA), Crop-livestock Integrated Program (P3T), Community Direct Aid Program (BLM), Community Direct Aid Loan Program (BPLM), and Group Capitalization Program (PMUK). In order to understand various factors associated with program failures, research had been conducted since the year 2007 in West Lombok district. Results of the study indicate that main factors contributed to the program failures are “top-down”, “project-based” and “supply-driven” approaches, lack of inter-agency coordination, and lack of local community awareness and commitment on empowerment. Another lesson learned from this study was that, even though technical innovation is an important part of livestock agribusiness system, its development and implementation should take into account of farmer participation.

Key Words: Agribusiness, Beef Cattle, Acation Research, West Lombok

ABSTRAK

Berbagai program telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan peternak, namun fakta menunjukkan bahwa banyak dari program dimaksud belum mampu mewujudkan peternak yang berdaya, dan bahkan gagal sama sekali. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di pulau Lombok, program-program tersebut antara lain Program Bantuan Pemda Kabupaten, Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), Program Ketahanan Pangan (PKP), Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project (NTAADP), Program Pengembangan Agribisnis (PPA), Peningkatan Produksi Padi Terpadu (P3T), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Dalam rangka memahami berbagai faktor penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut, maka sejak tahun 2007 telah dilakukan “penelitian – aksi” di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama dari ketidakberhasilan program-program pengembangan agribisnis peternakan antara lain program yang bersifat *top-down*, proyek, *supply-driven*, lemahnya koordinasi, serta rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan. Pelajaran lain yang penting dari penelitian ini adalah bahwa walaupun inovasi teknologi bidang peternakan hanyalah bagian dari sebuah sistem agribisnis peternakan, “pengembangan” dan aplikasinya perlu memperhatikan partisipasi petani peternak.

Kata Kunci: Agribisnis, Sapi Potong, Penelitian - Aksi, Lombok Barat

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti kesehatan dan pemenuhan asupan nutrisi yang

baik (khususnya yang berupa protein hewani) telah membawa konsekuensi pada meningkatnya permintaan daging. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 212

juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,5 persen per tahun. Laju pertumbuhan konsumsi protein hewani meningkat dari 1,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2003 menjadi 2,8 kg /kapita/tahun pada tahun 2005 (RIADY, 2004).

Disisi lain, laju pertumbuhan populasi sapi yang merupakan salah satu penyedia daging sangat lambat yaitu sekitar 0,21 persen per tahun. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan impor daging dan sapi bakalan dari negara lain seperti Australia untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri (MUZANI dan MASHUR, 2004). Sampai saat ini kebutuhan daging sapi dalam negeri hampir 27-30 persen dipenuhi oleh daging dan sapi impor (RIADY, 2004). Impor sapi yang dilakukan Indonesia dari tahun 2000 sebesar kurang lebih 250 ribu ekor meningkat terus sehingga mencapai angka 1,4 juta pada tahun 2003 (AUSTRALIAN BIRO OF STATISTIC, 2003 dalam RUTHERFORD, 2004).

Memperhatikan permasalahan tersebut di atas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan berbagai kebijakan dan program yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus memberdayakan petani peternak. Program-program tersebut antara lain Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), Program Ketahanan Pangan (PKP), Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project (NTAADP), Program Pengembangan Agribisnis (PPA), P3T, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Fakta tentang ketidakmampuan NTB, khususnya Lombok dalam memenuhi pasar ekspor maupun dalam negeri, menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan tersebut belum secara nyata mendukung upaya-upaya peningkatan produksi peternakan sapi di pulau Lombok.

Pertanyaan mendasar yang akan dijawab melalui kegiatan participatory action research ini adalah Bagaimana program-program tersebut telah dilaksanakan? Faktor-faktor apa yang terkait dengan keberhasilan atau kegagalannya? dan Bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih inovatif dan operasional dalam pemberdayaan petani peternak di pulau Lombok?

Tujuan akhir penelitian aksi ini adalah mengembangkan model atau pendekatan yang efektif dalam rangka pemberdayaan petani peternak di pulau Lombok dan peningkatan produksi sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging nasional. Untuk sampai pada tujuan ini, maka ada beberapa tujuan antara yang perlu dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- (1) Menganalisis semua program yang pernah ada dan dilaksanakan di pulau Lombok khususnya Lombok Barat dalam rangka pemberdayaan petani peternak (khususnya sapi), baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
- (2) Menganalisis dan memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan program, dan faktor-faktor yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan program.
- (3) Merumuskan *best practice* dan atau *model pemberdayaan peternak* yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan atau pendekatan dalam rangka peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani peternak.
- (4) Menguji coba *best practice* dan atau *model pemberdayaan peternak* pada lokasi atau kawasan yang disepakati.
- (5) Evaluasi dan revisi atau verifikasi model sebelum diujicoba dalam skala yang lebih besar.
- (6) Menghasilkan model pemberdayaan peternak sapi yang sesuai dengan kondisi pulau Lombok.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok, dengan mengambil lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan antara lain: (1) dari 3 (tiga) kabupaten dan satu kota yang ada di pulau Lombok, Kabupaten Lombok Barat mempunyai jumlah kelompok peternak yang paling banyak yaitu 324 (\pm 45%) dari total 778 kelompok yang ada di Pulau Lombok; (2) berbagai program pemberdayaan peternak telah dilaksanakan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal; (3) Lembaga pengusul (Universitas Mataram) berada sangat dekat dengan lokasi penelitian sehingga lebih

memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan *modified participatory action research* secara lebih baik (SUADNYA *et al.*, 2007).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Modified Participatory Action Research* (MPAR) atau Kaji-tindak Partisipatif Termodifikasi yang menggabungkan kegiatan survey, in-depth interviews, focus group discussion, workshop, dan action learning. Metode ini digunakan sebagai pendekatan dalam pengumpulan data, proses pembelajaran dan penyusunan rencana aksi yang kemudian diikuti dengan implementasi rencana aksi dalam skala terbatas (*pilot actions*), evaluasi dan pemantauan serta replikasi aksi dalam skala yang lebih luas (SUADNYA *et al.*, 2007; 2008; 2008a). Gambar 1 menunjukkan tiga

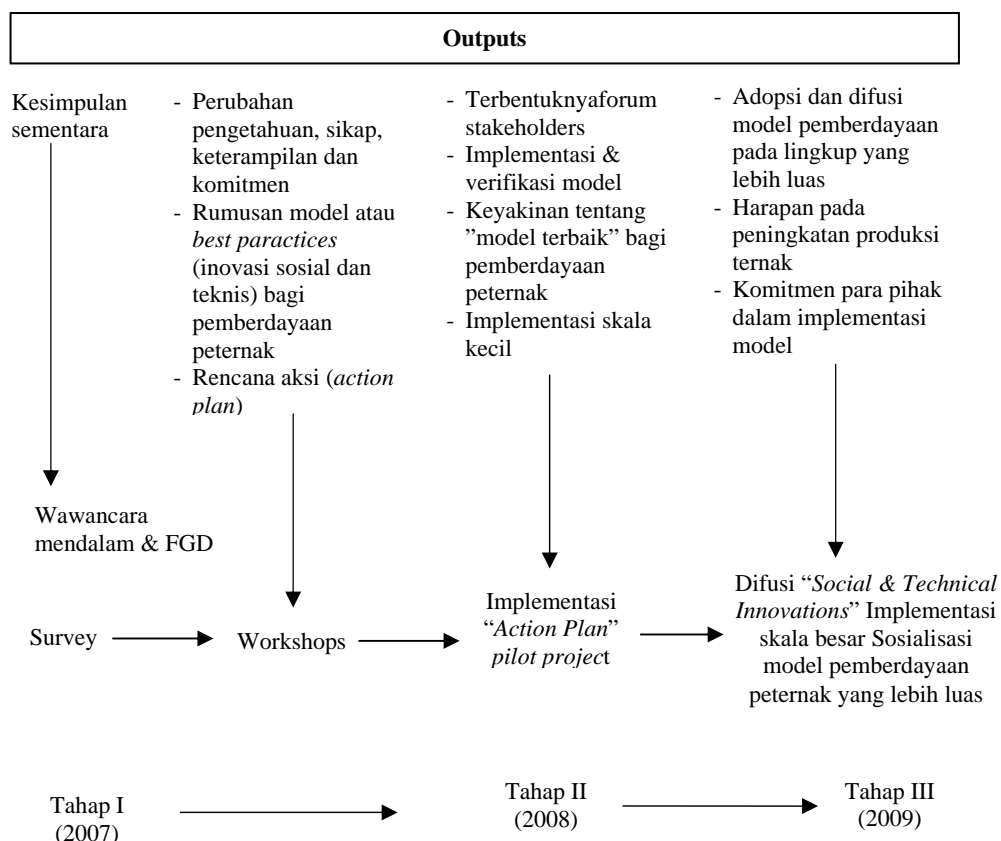
tahapan kegiatan dalam Metode MPAR, yang dirancang untuk kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program-program pemberdayaan peternak sapi di Kabupaten Lombok Barat

Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 18 program pemberdayaan peternak sapi yang pernah dan/atau sedang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, yang tersebar pada 15 kecamatan. Program-program tersebut dilaksanakan atas dukungan pendanaan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun dari sumber dana lainnya (Tabel 1).

Model konseptual dan pendekatan penelitian “*Modified Participatory Action Research – MPAR*” atau “Kaji-tindak Partisipatif Termodifikasi”



Gambar 1. Model konseptual dari pendekatan penelitian *Modified Participatory Action Research* (MPAR) atau kaji-tindak partisipatif termodifikasi

Tabel 1. Program-program pemberdayaan peternak sapi di Kabupaten Lombok Barat

Nama program	Lokasi pelaksanaan/kecamatan	Bentuk bantuan	Status tahun 2007
PPW/PPWT	Hampir di semua kecamatan di Lombok Barat kecuali Kec. Pemenang, Lingsar, Kuripan dan Lembar	Sapi bibit dan uang untuk membuat kandang	Kelompok masih aktif dan perguliran sudah berjalan dengan baik
PRT	di 8 kecamatan	Uang untuk pembelian sapi bibit	Kelompok aktif dan berhasil
INPRES	Kec. Kayangan dan Gangga	Sapi brahman dan kandang	
P3T	Kec. Tanjung	Sapi, kandang, uang untuk pengadaan hijauan dan saprodi	Kelompok bermaalah, perguliran tidak jalan
Gerbang Emas (GE)	Kec. Pemenang dan Lembar	Sapi bibit	Baru dimulai dan belum dapat dievaluasi
BANPRES	Gunungsari	Sapi Brahman dan kandang	Kelompok masih aktif
LIPI	Gunungsari	Bantuan sapi, kandang dan pengembangan biogas	Kelompok masih aktif
KUBE	Lingsar	Bantuan sapi dan pengentasan kemiskinan	Kelompok aktif/berhasil
PPA	Narmada dan Gerung	Bantuan dana 300 juta untuk konstruksi kandang dan pembelian sapi bibit	
PKP	Narmada dan Kediri	Pemberian bantuan dana untuk pengadaan sapi bibit pada program Village Breeding Center (VBC)	
BLM	Narmada, Gerung dan Lembar	Bantuan dana kepada kelompok untuk pengadaan sapi bibit	Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil
BPLM	Narmada, Gerung dan Lembar	Bantuan dana kepada kelompok untuk pengadaan sapi bibit, dengan status pinjaman dan harus dikembalikan	Kelompok masih aktif dan berhasil
PMUK	Narmada	Pemberian bantuan dana untuk pengadaan sapi dan pembuatan kandang yang kemudian dikembalikan untuk digulirkan	Belum bisa dinilai/kelompok aktif
PASP	Gerung dan Lembar	Sapi bibit	Kelompok tidak aktif
BUKPD	Gerung	Pemberian dana sejumlah 25 juta kepada kelompok tani untuk pengadaan sapi bibit melalui pola perguliran	Kelompok aktif/belum bisa dinilai
SILVO	Narmada	Sapi bibit	Kelompok bubar dan Tidak jelas/berhenti
DAU/DAK	Narmada dan Gerung	Pemberdayaan peternak melalui pemberian modal untuk pembelian sapi bibit dengan pola 1 - 1 - 4	
BATAN	Narmada	Uji coba program sapi potong dengan pola bagi hasil 60% : 40%	Kelompok bubar

Untuk keperluan pembelajaran, maka dalam hal ini disampaikan tiga program saja (representasi dari program yang dianggap kurang berhasil) sebagai bahan refleksi dan pembelajaran.

Program pengembangan wilayah terpadu (PPWT), di Kandang Kaok, Kecamatan Tanjung

Pola: Seperti halnya pada kasus PPWT di Kali Manting, pola yang digunakan di Kandang Kaok adalah 1 – 2 – 5, dimana petani menerima 1 ekor sapi bibit (umur antara 7 bulan hingga 1 tahun), kemudian mengembalikan 2 ekor sapi bibit dalam waktu 5 tahun - induk mejadi milik petani.

Proses: Dinas Peternakan melalui Desa dan PPL menyampaikan informasi tentang program PPWT. Kelompok (yang menghimpun para petani yang berminat) kemudian dibentuk dan dilaporkan ke Desa. Kelompok menyiapkan lokasi dan menerima sapi. Program ini bersifat *top down*, dan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan jumlah anggota kelompok – 26 ekor. Persyaratan utama bagi anggota kelompok adalah kesediaan memelihara sapi, tanpa adanya proses verifikasi dari Dinas Peternakan.

Cara perguliran: Begitu beranak, Ketua Kelompok melapor ke Kantor Cabang Dinas kecamatan, kemudian Dinas memberi arahan kepada Ketua Kelompok supaya sapi digulirkan kepada petani pada kelompok atau dusun yang sama. Jika tidak ada yang mau, maka guliran akan dilakukan pada dusun lain yang ditentukan oleh Dinas.

Masalah: Sapi yang diterima kondisinya kurang baik atau kurus (karena hasil guliran dari daerah lain – Lombok Tengah), pakan agak susah, peternak merasa berat jika harus mengembalikan 2 ekor, mereka ingin mengembalikan 1 ekor saja. Sapi sulit beradaptasi (dari areal lahan basah ke lahan kering) sehingga menjadi kurus, kandang kolektif tidak berlanjut karena petani pemilik tanah tidak menyewakan lahannya lagi. Pembinaan hanya di saat awal dan tidak ada pembinaan selanjutnya (setelah kelompok bubar).

Program penggemukan sapi potong dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), di Desa Nyiur Lembang-Kecamatan Narmada

Sebagaimana nama programnya, apa yang dilakukan oleh BATAN adalah program penggemukan sapi potong dengan sistem bagi hasil antara petani dengan BATAN. Keuntungan dari penggemukan setelah periode pemeliharaan selama 4 – 6 bulan akan dibagi dengan proporsi 40% untuk BATAN dan 60% untuk petani yang dirinci lagi masing-masing 50% untuk petani, dan 10% untuk kelompok. Pembelian sapi dilakukan oleh petani bersama Dinas Peternakan (Dinas yang membayar, petani memilih sendiri sapi yang akan dibeli), dan tidak ada patokan harga sehingga tiap petani bisa menerima bantuan berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penggemukan ini tidak berlanjut karena beberapa alasan antara lain (i) keuntungan tipis, tidak sesuai dengan biaya pemeliharaan (lelahnya melihara), (ii) ketua kelompok sulit dan kewalahan mengontrol anggota, dan (iii) merupakan uji coba, dan (iv) petani menganggap “lelah melayani” petugas Dinas Peternakan (SUADNYA *et al.*, 2007).

Program Peningkatan Produksi Padi Terpadu – Integrasi Sistem Padi dan Ternak (P3T-ISPT) di Desa Jenggala, Tanjung

Program ini didukung oleh Badan Litbang Pertanian dan pelaksanaannya adalah BPTP dan Dinas Peternakan Provinsi. Program ini menggunakan pendekatan kelompok, yaitu dengan menggunakan kelompok tani yang sudah ada. Beberapa kegiatan yang menyertai program ini adalah pelaksanaan *participatory rapid appraisal* (PRA) oleh BPTP, dan pelaksanaan Demonstrasi Area (untuk padi).

P3T ini dilaksanakan di desa Jenggala dan melibatkan 4 kelompok tani yang sudah ada dengan jumlah petani 200 orang dan luas areal 100 Ha. Semua kelompok dikumpulkan guna mendapatkan pengarahan dari Dinas Peternakan Provinsi. Proses berlangsung cukup lama sehingga kesepakatan kelompok

diperoleh dalam masa 3 – 4 bulan. Program P3T memberikan kepada petani berupa 200 ekor sapi sesuai dengan jumlah anggota serta bantuan pupuk dan bibit tanaman. Paket lain berupa kandang, pakan ternak: dedak 3 kg/hari/ekor, sepatu, perawatan kesehatan ternak dan obat-obatan.

Pola: Setiap petani yang terlibat dalam program mendapatkan dana sebesar Rp. 2.600.000, untuk dibelikan seekor sapi sebesar Rp. 2.125.000, dan iuran pembelian tanah untuk kandang kelompok sebesar Rp. 475.000. Kandang kolektif dengan berbagai fasilitas pendukung telah dibangun, dan forum ketua kelompok juga dibentuk oleh pemerintah. Pada saat membeli sapi petani diajak oleh ketua kelompok, dan dengan harga tersebut petani mendapat sapi betina siap bunting. Model pengembalian sama seperti PPWT dan bergulir yaitu 1 – 2 – 5.

Dalam pelaksanaannya, program ini langsung berhadapan dengan permasalahan disaat awal pendistribusian sapi. Begitu sapi datang petani mengambil bagiannya dan dibawa pulang ke rumah masing-masing padahal ada kandang kelompok yang disiapkan. Selain itu administrasi dan pengelolaan sapi tidak jelas (Sudah berjalan 5 tahun, sapi masih ada, masih diakui oleh petani kalau sapi bukan milik pribadi, tapi yang menyeter belum ada, peternak ragu karena dana atau sapi yang dikembalikan tidak jelas akan dimanfaatkan untuk apa dan oleh siapa). Di sisi lain ditemukan fakta bahwa jarak antara rumah petani dengan kandang relatif jauh sehingga menyulitkan dalam pengurusan sapi. Sapi yang terlanjur dikandangkan di kandang kolektif tidak ada yang mengurus, dan kemudian sebagian diambil dan dikelola oleh Forum dan oknum desa (tidak jelas pengelolaannya).

Secara umum program ini dianggap kurang berhasil (gagal). Fakta pelaksanaannya menunjukkan bahwa kelompok dan kandang kolektif tidak berfungsi dan petani membawa pulang sapi ke rumah masing-masing. Administrasi pembagian dan pengembalian sapi juga tidak jelas. Ketika penelitian ini dilaksanakan, kasus penyimpangan pelaksanaan program P3T tengah ditangani kejaksaan.

Faktor-faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan petani peternak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian program pengembangan peternakan yang dilaksanakan di Lombok Barat ternyata kurang berhasil, yang ditunjukkan oleh antara lain program tidak berlanjut, kelompok bubar, petani tidak memiliki ternak lagi, dana tidak kembali, terjadi konflik sosial, dan petani tetap miskin. Kurang berhasilnya program-program tersebut disebabkan oleh antara lain pendekatan yang paralel dan kurang terkoordinasi, bersifat *top down* yang kurang partisipatif (konsep *Transfer of Technology*), pendekatan dengan pemberian insentif (tidak efektif), dan upaya-upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi obyektif. Selain faktor-faktor eksternal tersebut, faktor-faktor internal dan lingkungan masyarakat juga turut mempengaruhi ketidakberdayaan masyarakat (SUADNYA *et al.*, 2007; 2008; 2008a).

Pendekatan paralel, parsial dan kurang koordinasi seringkali berdampak pada duplikasi pelayanan, pemborosan dana dan tenaga. Tidak ada proses konvergensi sumberdaya yang seharusnya dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi penting ketika program atau proyek diarahkan kepada sasaran yang juga menjadi sasaran pihak lain atau yang menghendaki koordinasi dan pendekatan sistem, sebagaimana diungkapkan oleh CHAMALA (1995), bahwa koordinasi dan sinergi berbagai program merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Pendekatan *top down* tampak jelas pada semua kasus di atas, yang berakibat pada kurangnya partisipasi dalam proses-proses kelompok, dari perencanaan hingga pengawasan dan penikmatan hasil. Disadari bahwa partisipasi menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan sebagaimana juga diungkapkan oleh HAMMER (1994), BURKEY (1993), CERNEA (1991), OAKLEY (1994) dan THOMPSON (1995). Beberapa alasan bagi munculnya pendekatan *top down* ini antara lain sifat program yang 'segera', dan usaha-usaha untuk mencapai 'target' dalam jumlah dan batas waktu.

Selain itu, kekeliruan persepsi terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagai suatu proses transfer teknologi dan penyampaian program menyebabkan kita memperlakukan masyarakat sebagai pihak yang menerima program, dan kelompok sebagai alat untuk mentransfer teknologi dan program. Akibatnya, terbentuk persepsi bahwa kelompok menjadi milik instansi tertentu, dan bukan menjadi milik petani. Kelompok yang demikian akan mengadakan kegiatan atau pertemuan kalau memang dikehendaki oleh instansi yang bersangkutan. Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa kelompok tidak berfungsi setelah selesainya program/proyek. Keadaan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh MUKTASAM dan CHAMALA (1998) bahwa pendekatan proyek/program akan berdampak pada tidak lestariannya kelompok, karena kelompok dibentuk untuk program.

Faktor teknologi vs non-teknologi

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan paket teknologi bukan merupakan jaminan bagi pencapaian tujuan dalam pengembangan agribisnis peternakan, khususnya dalam pengembangan dan pemberdayaan peternak sapi. Sistem integrasi tanaman dengan sapi (*Crop Livestock System*) seperti yang dikemukakan pada kasus P3T di atas mencerminkan bahwa ada faktor lain yang sangat menentukan, yaitu pendekatan dalam pelaksanaan program. Hal yang sama terjadi pada program penggemukan yang dimotori oleh BATAN, dan program pengembangan sapi bibit melalui PPWT. CERNEA (1991) mengungkapkan pentingnya memperhatikan faktor sosiologis suatu masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan bukan hanya sekedar teknologi.

Alternatif pemecahan masalah

Memperhatikan hal tersebut diatas maka dua model perguliran telah disepakati. Model pemberdayaan untuk Lombok Barat Bagian Tengah yaitu penggabungan antara pola BPLM/PMUK dengan pola penggemukan. Dengan pola ini peternak yang sudah diseleksi

melalui proses pemberdayaan tersebut di atas diberikan bantuan dua ekor sapi untuk dipelihara. Satu ekor sapi betina siap bunting untuk dipelihara dengan pola pengembalian 1 : 1 : 4 (pola BPLM/PMUK), dan satu ekor sapi bakalan untuk penggemukan dengan pola bagi hasil 60% untuk peternak dan 40% untuk kelompok. Alasan-alasan bagi pemilihan model ini adalah:

- (1) Pemberian sapi betina dengan sistem 1 : 1 : 4 dapat digunakan sebagai tabungan oleh peternak, sedangkan sapi bakalan untuk penggemukan dapat dijual setelah dipelihara 4 – 6 bulan dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
- (2) Penerimaan dari bagi hasil yang dikelola oleh kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kelompok dan pemenuhan kebutuhan kelompok dengan demikian kelompok akan semakin maju dan mandiri.
- (3) Dinas Pertanian dan Peternakan melihat bahwa penggabungan pola PMUK (pembibitan dengan pola 1 : 1 : 4) dan pola penggemukan akan meningkatkan jumlah ternak sapi dan peternak.
- (4) Pola ini akan dapat meningkatkan pendapatan petani karena ada dua sumber penghasilan peternak. Jangka pendek melalui pola penggemukan dan jangka panjang melalui pola PMUK.
- (5) Kelompok semakin eksis sehingga memudahkan pembinaan selanjutnya. Hal ini terjadi karena hasil dari pola bagi hasil sapi penggemukan sebanyak 40% dapat digunakan untuk mengembangkan kelompok, baik untuk insentif pengurus maupun penguatan modal kelompok.

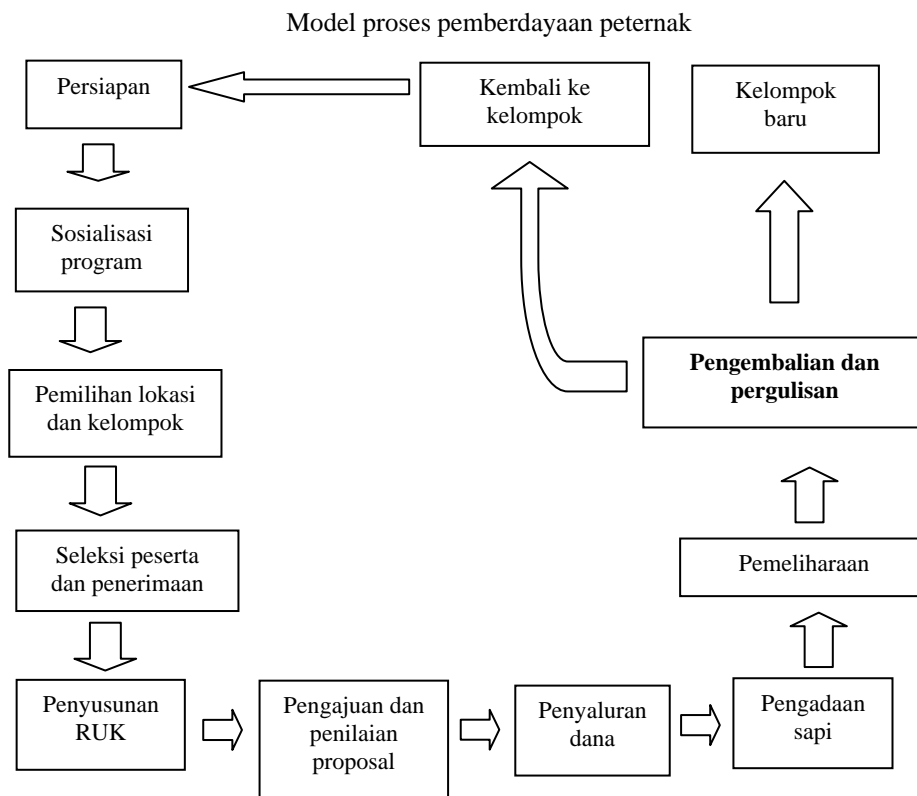
Dengan memperhatikan kondisi biofisik, sosial dan budaya, keinginan peternak, pengembangan kelompok dan kebijaksanaan pemerintah daerah, maka model pemberdayaan untuk peternak di Kabupaten Lombok Barat bagian utara dan bagian selatan adalah dengan pola 1 : 2 : 5. Melalui model ini:

- (1) Peternak diberikan bantuan satu ekor induk sapi umur tahun siap bunting dengan tinggi 110 – 120 meter.
- (2) Peternak bersama pengurus kelompok membeli sapi ke pasar dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Pertanian dan

- Peternakan untuk memastikan sapi betina sehat dan layak untuk bibit.
- (3) Pengembalian dilakukan dengan sistem 1 : 2 : 5 artinya petani memperoleh satu induk sapi dikembalikan 2 ekor anak dengan ketentuan umur 2 tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Induk menjadi milik peternak awal, satu ekor anak digulirkan, dan satu ekor anak menjadi milik kelompok (milik bersama). Dengan pola ini akan ada ikatan yang kuat yang mempertahankan petani untuk tetap menjadi anggota kelompok, dan pada saat bersamaan kelompok akan memiliki modal untuk mengembangkan usahanya.

Alasan pemilihan model ini menurut para pihak adalah apabila seorang peternak diberi bantuan 1 ekor sapi siap bunting maka pada tahun kelima diharapkan peternak sudah memiliki paling tidak 1 ekor induk dan 3 ekor anak (yang lahir tahun ke-3, 4 & 5; dengan asumsi sapi tidak mandul; yang dikembalikan adalah anak yang lahir tahun ke-1 dan 2. Model ini secara jelas menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan jumlah peternak dan jumlah sapi melalui proses guliran. Peternak dapat menambah penghasilan, dan kelompok akan lestari.

Pada kedua model tersebut di atas, proses pemberdayaannya yang direkomendasikan adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model proses pemberdayaan peternak di Kabupaten Lombok Barat menurut para pihak

KESIMPULAN

Banyak program telah dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis peternakan dan pemberdayaan petani peternak, namun tidak semua program dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Faktor-faktor yang dianggap berperan dalam kurang berhasilnya program tersebut antara lain pendekatan yang bersifat *top down* (khususnya dalam pengembangan model dan konsep), tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, pendekatan bersifat proyek dan tidak berlanjut, dan rendahnya komitmen masyarakat untuk secara serius mendukung program-program yang ada.

Beberapa catatan penting sebagai pelajaran bagi upaya mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis peternakan adalah sebagai berikut (i) hindari pemaksaan konsep – sesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal (kasus P3T); (ii) pendekatan partisipatif – pengadaan sapi secara bersama, termasuk dalam pengembangan model, konsep, dan inovasi teknologi; (iii) *bottom up* (perencanaan pembangunan kandang dan program-program lainnya); (iv) terintegrasi – horizontal dan vertikal (memperhatikan sistem usahatani, industri pengolahan dan agribisnis; pemikiran tentang pentingnya pengembangan industri pengolahan hasil seperti daging, kulit dan lainnya; belajar dari keberhasilan integrasi vertikal pada sektor perunggasan seperti yang dilakukan oleh Charoen Pokphand); (v) kejelasan proses awal dan akhir (mekanisme kontrol dan pengawalan dalam perguliran, pembinaan, supervisi dan *support* lainnya); (vi) pendekatan kelompok yang efektif – kandang kolektif/individual; (vii) proses *adaptive management* – proses refleksi yang berkelanjutan; (viii) insentif pasar bagi produk peternakan – perkuat informasi pasar dan posisi tawar petani (gapoktan); (ix) kebijakan dan program yang mendukung – harga, ekspor dan peningkatan kualitas, dan kapasitas petani; dan kondisi bio-fisik dan lingkungan sosial yang mendukung – ketersediaan air, pakan, peran pranata dan modal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- BURKEY, S. 1993. *People First: A Guide to Self-reliance Participatory Rural Development*. London: Zet Books Ltd.
- CERNEA, M.M. 1991. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*. New York, Oxford University Press.
- CHAMALA, S. 1995. Overview of Participative Action Approaches in Australian Land and Water Management. *In: Participative Approaches for Landcare: Perspective, Policies, Program*. CHAMALA, S. and K. KEITH. (eds.) (1995). Brisbane: Australian Academic Press. pp. 5 – 42.
- HAMMER, M. 1994. "Why Project Fail". *Ceres* 145 (January - February): 32 – 35.
- MUKTASAM, A. and S. CHAMALA. 1998. Group Approach in Indonesian Rural Development: Why It Fails? In *Learning Communities, Regional Sustainability and the Learning Society Conference Proc.* Launceston, Tasmania. pp. 254 – 262.
- MUZANI, A. dan MASHUR. 2004. Prospek pengembangan sapi potong di Nusa Tenggara Barat. Makalah Disampaikan pada Lokakarya Nasional 2004.
- OAKLEY, P. 1994. Bottom-up Versus Top-Down: Extension at The Crossroads. *Ceres* 145 (January - February): 16 – 20.
- RIADY, M. 2004. Tantangan dan peluang peningkatan produksi sapi potong menuju 2020. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Sapi Potong, 2004.
- RUTHERFORD, A. 2004. Economic and Marketing factors affecting the adoption and impact of the Integrated Production System Developed for Bali Cattle in Eastern Island of Indonesia, ACIAR Project Report 2004.
- SUADNYA, I W., MUKTASAM, E. MARTINDAH dan R.A. SAPTATI, 2008. Pemberdayaan Peternak Sapi Di Kabupaten Lombok Barat: Multi Stakeholder Perspektif, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Dalam Ranka Dies Natalis Fakultas Pertanian Unram.
- SUADNYA, I W., MUKTASAM, E. MARTINDAH dan R.A. SAPTATI, 2008a. Model Pemberdayaan Peternak Sapi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Daging: Aplikasi Partisipatory Action Research di Pulau Lombok. Makalah di submit Kepada Badan Litbang Pertanian.

- SUADNYA, I-W., MUKTASAM, E. MARTINDAH dan R.A. SAPTATI. 2007. Pemberdayaan Peternak Sapi dalam Rangka Peningkatan Produksi Daging: Sebuah Pendekatan *Participatory Action Research* di Pulau Lombok, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan Universitas Mataram.
- THOMPSON, J, 1995. Participatory Approaches in Government Bureaucracies: Facilitating the process of institutional changes. *World Development*, 23(9): 1521 – 1554.